

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Pengantar

Kompleks gedung yang atapnya seperti buku yang terbuka, saya yakin semua pasti pernah melihatnya. Bukan gedung yang asing dalam penglihatan kita. Jika belum pernah pergi ke sana, setidaknya pernah melihatnya di layar kaca sebab hampir setiap kali sosok gedung ini ditampilkan di layar televisi. Kompleks gedung itu dinamakan gedung DPR/MPR RI. Oleh karena tempatnya di daerah Senayan, maka populer juga disebut gedung Senayan, maksudnya sama yaitu gedung tempat anggota DPR atau parlemen Indonesia bekerja.

Di sana, keputusan-keputusan penting menyangkut negeri ini diputuskan. Pasti dengan demikian apa yang ada di dalamnya adalah penting, termasuk orang-orangnya pasti orang penting. Mereka adalah wakil rakyat yang setiap 5 tahun sekali dipilih rakyat melalui pemilu.

Seperti juga orang lain, saya sering protes terhadap apa yang keluar dari tangan orang-orang penting itu. Misalnya saja soal kenaikan harga BBM (2005), kenaikan itu menyebabkan rakyat sibuk ngantri minyak tanah, tapi DPR justru sibuk menaikkan jumlah gajinya. Saya tak habis mengerti. Saya teringat kata-kata seorang kawan dalam milis, ia menepiskan kegalauan atas situasi yang kontras itu dengan menuliskan kritik yang kira-kira bunyi yang saya ingat begini,

"namanya wakil rakyat, tugasnya ya mewakili rakyat,
rakyat butuh kesejahteraan, kesejahteraannya sudah diwakili wakil rakyat,
rakyat butuh upah naik, kenaikan upahnya sudah diwakili wakil rakyat
rakyat butuh makan supaya kenyang, sudah pula diwakili wakil rakyat
yang selalu makan kenyang dan enak.

rakyat butuh mobil, ya juga sudah diwakili wakil rakyat yang punya mobil mewah

namanya juga wakil rakyat, tugasnya ya mewakili rakyat"

Sitiran ini tidak sama persis dengan kata kawan dalam milis, tapi setidaknya maknanya sama.

Ilmu politik punya kebiasaan membangun analisa yang makro di dalam usahanya memahami fenomena politik seperti fenomena politik di DPR. Biasanya pakar politik itu sibuk menjelaskan mengenai sistem pemilu yang representatif di mana semua kalangan masyarakat dapat terwakili, atau mereka membuat penjelasan dengan pola rekrutmen politik yang partisipatif, atau juga mengatakan ada masalah dengan komunikasi politik partai dengan publik, dan banyak lagi analisa-analisa makro dari ilmu politik.

Saya menduga bahwa tak semua fenomena di DPR dapat didekati dan dijelaskan dari pendekatan makro politik. Seperti misalnya bagaimana membangun penjelasan politik mengenai adanya kebutuhan privasi anggota DPR yang diimplementasikan dengan rencana *redesign* gedung DPR. Menurut berita, rencana *redesign* gedung DPR diperlukan karena kondisi kelaikan gedung, keinginan merancang gedung DPR sebagai tempat wisata (Media Indonesia online, 12/09/2007, Detikcom, 05/09/2007), dan juga mengakomodasi keinginan para anggota DPR yang memerlukan privasi (Detikcom, 05/09/2007, Okezone, 05/09/2007). Sekretariat Jenderal BURT DPR RI, Nining Indrasaleh dalam salah satu jumpa pers mengatakan bahwa anggota DPR yang ada di gedung ini harus disiapkan ruang privasinya. (Okezone.com, Rabu, 05/09/2007). Ketua BURT bahkan menganggap perlu adanya penambahan ruang publik dan ruang *privacy* dalam *redesign* gedung DPR (Detikcom, 05/09/2007). Bahkan salah satu bentuk privasi itu adalah adanya kamar mandi sendiri (Detikcom, 05/09/2007). Untuk keperluan itu sekretariat jenderal telah mengundang konsultan menganalisis kelaikan Gedung DPR, juga menyusun *grand design* pembangunan dan renovasi kompleks parlemen. Faisal Djamil, Sekjen DPR RI mengatakan bahwa *grand design* itu adalah rencana jangka panjang untuk mewujudkan kompleks parlemen sebagai simbol negara sekaligus objek wisata. (Media Indonesia online, 12/09/2007). Rencana itu sendiri memerlukan biaya sedikitnya Rp 40 miliar. Suatu kontroversi di tengah kemiskinan rakyat yang luar biasa.

Berita kontroversial juga datang dari rencana pemberian fasilitas laptop bagi anggota DPR, sebanyak 550 orang, dengan harga laptop per unitnya adalah Rp 21 juta rupiah. Pengadaan laptop tersebut akan menghabiskan anggaran hingga

Rp 12,1 miliar rupiah. Anggaran diambil dari APBN 2007. (Detikinet.com, 20/03/2007). Salah seorang anggota DPR, wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Defawati Ande mengatakan pembagian laptop ini jangan dianggap sebagai pemborosan, namun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja anggota DPR. Ia menambahkan, "Ini jangan dilihat dari sisi itu (bagi-bagi di tengah kesusahan rakyat). Tapi dilihat dalam kerangka perbaikan kinerja dewan, kalau menteri saja didampingi profesor, masak kita ketinggalan terus. Ini untuk perbaikan DPR dari segi IT."(Detikinet.com, 20/03/2007). Padahal harga sebuah laptop yang cukup fungsional bagi kebutuhan anggota DPR tak harus menelan biaya sebesar itu. Padahal suka tidak suka harus diakui, banyak anggota DPR kita yang tak mampu mengoperasikan laptop, jadi hendak dipergunakan untuk apa laptop itu bagi mereka ?

Sementara itu persoalan rakyat yang antri minyak, makan nasi aking, bahkan mati karena kelaparan, tidak segera mendapatkan perhatian dari Senayan. Sekalipun gambar-gambar kemiskinan yang mengharu biru itu muncul di koran-koran nasional yang mampir setiap hari di ruangan kantor para anggota DPR. Suatu situasi yang kontras, seperti sitiran kritik di atas.

Sesekali ada memang ungkapan di Senayan tentang kepentingan rakyat. Namun cerita kepentingan nasib rakyat tidak selalu hadir sendirian dari dasar nurani yang tulus, tetapi bersandingan dengan kepentingan kelompok dan tak luput pula keinginan aktualisasi diri. Pernyataan mengenai nasib rakyat dibungkus dalam gerak atraktif pidato yang menggebu-gebu dan penampilan bak pejuang rakyat, sekali waktu dilengkapi kostum topi pet, sekali waktu jaket hitam dan tangan terkepal atau jari menunjuk ke muka. Semua itu adalah bagian dari suatu penampilan yang dipersiapkan. Soal bahwa bagaimana perbaikan nasib rakyat itu dapat direalisasikan itu soal yang berbeda.

Selebihnya mereka sibuk *memake-up* dirinya dengan atribut jas mahal bermerk, laptop mahal, hingga mobil mewah yang berseliweran di jalanan. Saya menduga ilmu politik dengan pendekatan yang makro akan teragap-gagap menjelaskan kontroversi seperti itu.

Ribuan jam sudah saya habiskan bersama detak napas hiruk-pikuk semua aktor yang berada di dalam kompleks gedung ini, DPR/MPR RI. Dari ribuan jam bersama mereka itulah saya menyadari bahwa bahwa syaraf kepekaan anggota DPR terhadap persoalan-persoalan rakyat tak dapat dijelaskan hanya dari analisa politik makro yang sibuk membuat penjelasan mengenai rekrutmen politik, demokratisasi sistem politik, komunikasi politik, dan lain-lain. Analisa itu gagap dalam membangun penjelasan mengenai fokus prioritas perhatian anggota DPR yang sesungguhnya.

Pada saat demikian, menjadi sebuah tantangan bagi antropologi untuk menjelaskan ruang kosong ini. Justru karena antropologi konsisten dengan sifat-sifatnya yang mikro, namun sebenarnya membangun holisme dalam penjelasannya terhadap sebuah fenomena. Antropologi yang semakin emik juga tertantang untuk mengisi kekosongan ruang di dalam memahami ranah politik.

Telah lama antropologi melakukan banyak penelitian mengenai mereka yang senantiasa dikalahkan termasuk usaha-usaha mereka membangun resistensi atas kekuatan yang dominan seperti yang Scoot dan selanjutnya peneliti lain banyak melakukannya. Namun masih sangat jarang penelitian terhadap mereka yang berada dalam posisi menang, bagaimana mereka membangun imajinasi mengenai dirinya, mendefinisikan dirinya serta kekuasaan yang ada di tangannya. Menurut saya, sangat menarik meneliti kelompok yang dianggap memenangkan situasi. Penelitian mengenai kelompok yang menang ini penting agar kita dapat memahami bagaimana usaha mereka dalam memperoleh dan mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Hal tersebut juga akan membantu memahami mengapa berbagai keputusan politik itu dapat berbeda dengan kehendak rakyat, bukan dari kacamata kaum yang dikalahkan, melainkan melihat dari jarak terdekat di mana keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan itu dibuat, yaitu dari kacamata para pengambil keputusan tersebut.

Selama ribuan jam di Senayan, saya justru seringkali tersadarkan oleh pesona simbol-simbol yang dipancarkan dari segala sudut yang tertangkap dalam pandangan saya. Hampir setiap gerak menyiratkan makna. Setiap perkataan kaya oleh makna. Sampai-sampai saya mengerjapkan mata, suatu reaksi ketakjuban

pada gerak-gerak simbolik yang kadang muncul tak terduga. Saya ingin segala yang saya tangkap disajikan ke hadapan para pembaca. Ini bukan sesuatu yang makro, melainkan hal-hal detail di DPR. Saya ingin membawanya ke sidang pembaca dan membawa serta pembaca memahami segala gerak laku, atribut hingga perkataan yang penuh dengan simbol. Kita hanya perlu menafsirkannya bersama, sehingga bentuk-bentuk simbolik itu memiliki makna yang dapat membuat kita mengerti bagaimana sesungguhnya parlemen Indonesia itu mempersepsikan dirinya, membangun penampilan estetikanya, dan mencapai orientasi mereka yang sesungguhnya.

Pembicaraan mengenai politik sesungguhnya bukan domain ilmu politik semata-mata. Sebab politik dapat dimaknai dalam berbagai kacamata ilmu pengetahuan. Politik dapat dianggap sebagai adalah aktivitas konkrit, yang melibatkan di dalamnya berbagai tindakan politik berupa interaksi fisik dan tubuh (*bodily*) di antara berbagai aktor politik. Politik adalah juga interaksi simbolik berupa penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang ditampilkan melalui berbagai bentuk tingkah laku, penampilan diri, gaya hidup, kebiasaan, dan kepemilikan barang-barang. Politik juga adalah aktivitas abstrak, yang dibaliknya beroperasi ide, gagasan, atau keyakinan-keyakinan tertentu yang disebut ideologi politik.

Saya ingin menempatkan politik dalam ruang budaya. Ia bukanlah suatu *mainstream* ideologi politik tertentu yang hampir susah untuk diperdebatkan karena kadang-kadang menyangkut suatu keyakinan. Ia mungkin lebih mirip soal perilaku, gaya, identitas, yang bergerak dinamik dan longgar. Suatu yang lebih material ketimbang suatu yang berada di arena paradigmatis.

Di dalam arena politik seperti yang saya maksudkan, wacana dan aktivitasnya dibangun bukan hanya oleh pandangan nalar-nalar rasional, akan tetapi diwarnai oleh berbagai trik rayuan menggoda orang untuk menentukan pilihan politiknya. Mekanisme yang bekerja di dalam rayuan, juga tidak lagi relasi psikis atau psikologis, tidak pula represi atau ketaksadaran, akan tetapi relasi permainan, tantangan, duel, dan strategi penampakan. Wajah politik saat ini tak lebih adalah dunia politik yang dibangun oleh permainan citra, artifisialitas

(*artifice*), dan strategi penggunaan simbol sebagai cara untuk memperoleh posisi atau mempertahankan posisi.

Wajah para politikus adalah perayu, ditampilkan dalam berbagai tampilan mimikri untuk menimbulkan efek-efek penuh pesona. Dengan meniru secara palsu sebuah dimensi, maka tidak relevan lagi pertanyaan tentang kebenaran politik, melainkan ekses realitas. Wajar jikalau terdapat keterputusan (*discontinuity*) antara mandat yang diberikan guna menyampaikan aspirasi rakyat dengan panggung politik riil yang lebih menitikberatkan pada pembentukan simbol personal-insitusal yang lebih diwarnai kemeriahan atribut makna. Di dalam ruang politik seperti ini, yang menjadi persoalan bukanlah membangun batas-batas antara benar/salah, baik/buruk, moral/amoral, melainkan kemampuannya dalam mengoptimalkan penampilan demi membuat setiap orang terpesona.

Panggung politik, seperti parlemen, memperlihatkan proses di mana simbol-simbol yang diproduksi terputus dari realitas yang direpresentasikannya. Tubuh-tubuh (politikus maupun partai) ditampilkan seakan-akan merepresentasikan realitas tertentu, akan tetapi sesungguhnya tidak memiliki relasi apa pun dengan realitas itu. Para politisi maupun partai politik dihiasi dengan warna-warni penampilan, kosmetik, parodi, dan permainan simbol, bukan untuk melukiskan sebuah realitas politik, melainkan untuk menjauhkan rakyat dari realitas yang sesungguhnya untuk digiring ke dalam realitas-realitas tanda di dalam permainan politik.

Perbincangan politik yang melibatkan secara esensial berbagai aktor di dalamnya, tidak dapat dipisahkan dari perbincangan tentang manusia politik sebagai subyek. Manusia menjadi subyek dari bahasa, simbol, atau ideologi. Manusia menjadi subyek dapat dalam pengertian pasif sebagai pengguna atau dalam pengertian aktif sebagai pencipta bahasa, simbol, atau ideologi tersebut. Berbagai posisi subyek politik di dalam ranah politik sangat menentukan bagaimana kebenaran diproduksi.

Anggota DPR adalah aktor yang memiliki kapasitas besar dalam mengkontruksi citra dirinya termasuk melalui bahasa maupun simbol-simbol lainnya. Interaksi sosial para anggota DPR pun sarat dengan interaksi simbolik

melalui penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang ditampakkan dalam tingkah laku, penampilan, gaya hidup, kebiasaan, maupun kepemilikan benda-benda. Semua itu diperlukan untuk memperkuat citra estetika kelas sosial yang ingin mereka tampilkan. Citra estetik mengenai dirinya sebagaimana melekat dalam sebutan kepada mereka, "anggota dewan yang terhormat," diproduksi sedemikian rupa sehingga citra estetik itu membedakan mereka dengan kelompok sosial lainnya.

Setidaknya Milal (2004) memulai dengan melakukan penelitian terhadap budaya negosiasi politik anggota DPR. Melalui "Kafe, Lobi, dan Amplop" ia sedikit banyak mengungkapkan hasil penelitian yang menguatkan 'rahasia umum' di balik pengambilan keputusan politik di Senayan. Rahasia umum itu adalah bahwa para anggota DPR tersebut memiliki aktivitas lain di balik proses pengambil keputusan politik formal di DPR, yaitu aktivitas yang terkait dengan cafe, lobby, dan amplop. Kafe, lobi, dan amplop secara nyata justru memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan politik yang diambilnya. Milal (2004) berusaha melihat apa yang ada di balik keputusan-keputusan formal, ia melihat apa yang ada di belakang panggung persidangan formal di DPR.

Milal menyebutkan adanya jaringan-jaringan tersembunyi yang terjadi lintas fraksi dengan orientasi pada uang lebih bagi anggota DPR. Keharusan untuk mengalokasikan biaya politik bagi konstituen, kerabat, dan serta jaringan patronase politik menyebabkan anggota DPR mencari jalan lain untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai segala biaya politik tersebut.

Gaya hidup dari hotel ke hotel dan kafe ke kafe sendiri membutuhkan biaya penampilan yang juga besar. Penampilan itu tak sekedar baju mahal, jas mahal, sampai pinggang yang juga mahal, namun juga hingga mobil mahal yang mendukung penampilan.

Pernyataan dalam persidangan pun digambarkan Milal (2004) sebagai suatu bentuk penampilan muka saja, sebab di belakang sidang telah terjadi kesepakatan-kesepakatan transaksional. Menurut Milal (2004) ini adalah bagian

dari suatu budaya negosiasi kebijakan yang dipenuhi dengan perilaku transaksional yang berorientasi pada uang.

Selain soal uang, anggota DPR membutuhkan popularitas. Kebutuhan akan popularitas itu dipenuhi dengan cara membayar wartawan media massa agar menampilkan dirinya secara positif dalam berita. Penampilan dalam berita penting untuk tak hanya mengenalkan dirinya di hadapan publik tetapi juga membangun popularitas. Image di media massa memang menjadi hal yang sangat penting bagi anggota DPR, karena itu maka tidak heran menjamur pula majalah-majalah yang memberikan slot tertentu dengan harga tertentu pula kepada para anggota DPR agar dapat dimuat dalam cover majalah tersebut. Salah satu alasannya adalah anggota DPR butuh dikenal banyak koleganya di DPR sendiri maupun dikenal oleh publik lainnya.

Kebutuhan akan uang dan popularitas adalah dua hal yang dalam kedua penelitian itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi anggota DPR. Namun demikian, saya sampai pada suatu renungan, bermakna apakah dua hal itu (popularitas dan uang) bagi anggota DPR. Tentu keduanya tak sekedar menggambarkan kebutuhan subjektif anggota DPR, melainkan memiliki makna yang lebih luas lagi bagi lingkungan sosial di mana mereka berada.

Saya menganggap penting suatu penelitian lain yang ditulis oleh Wierdaningsih (2002) mengenai rekrutmen anggota DPR perempuan. Isi tesis Wierdaningsih (2002) cukup menarik bagi saya. Wierdaningsih (2002) menunjukkan kuatnya pengaruh unsur jaringan di dalam rekrutmen anggota DPR perempuan. Jaringan tersebut dapat terutama sekali hubungan kekerabatan dan organisasi yang digunakan perempuan parlemen untuk mendapatkan kursi di DPR dan juga mempertahankan posisinya sebagai anggota DPR terus-menerus.

Saya menempatkan beberapa kajian tesis yang mencoba mengupas seluk-beluk parlemen Indonesia yaitu anggota DPR RI, sebagai bahan belajar kepada saya. Setidaknya usaha mereka mengupas parlemen membantu untuk memulai penelitian saya sendiri, setidaknya agar tidak mengulang melongok melalui jendela yang sama yang mereka buka. Perlahan-lahan saya akan membuka jendela yang saya pilih untuk memulai melihat lebih luas lagi ke kedalamannya.

Rumusan Pertanyaan Penelitian

Dalam bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa ditengarai para wakil rakyat, yaitu anggota DPR memiliki orientasi mengenai estetika dirinya sendiri, sibuk membangun citra dirinya, penampilan, aksi-aksi parodi, dan permainan simbolik lainnya. Menjadi penting bagi saya untuk merumuskan pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses produksi identitas simbolik anggota DPR itu berlangsung ?
2. Bagaimana atribut-atribut simbolik digunakan untuk melengkapi identitas mereka tersebut ?

Kedua pertanyaan itu sesungguhnya diharapkan dapat mengungkapkan lebih jauh makna dari identitas simbolik yang diproduksi itu bagi mereka yang menciptakannya (anggota DPR) di dalam ranah politik yang mereka "huni."

Tujuan Penelitian

Pengalaman terlibat di dalam pergerakan mendorong demokratisasi dari sebuah rejim yang otoriter membawa saya dalam suasana senantiasa bertanya, mengapa pasca turunnya rejim otoriter, demokrasi yang menjadi harapan rakyat tak jua kunjung tiba. Berbagai upaya perubahan sistem politik untuk mendorong terciptanya demokrasi sebagaimana yang diimpikan rakyat tak jua menunjukkan hasil menyenangkan. Agaknya ada kekosongan dalam penjelasan mengenai jarak antara harapan politik rakyat dengan persepsi para wakil rakyat. Studi ini diharapkan mampu menemukan kelemahan model demokrasi yang kita terapkan dengan melihat sisi wajah mereka yang dianggap sebagai kelompok yang memegang mandat formal kekuasaan. Suatu penglihatan dengan cara mikro namun mendalam, sesuatu yang khas antropologi.

Secara subjektif, saya berharap ini menjadi langkah awal untuk memproyeksikan antropologi sebagai studi yang tidak hanya membahas kekuatan tersembunyi dari mereka yang dianggap dikalahkan, melainkan juga apa yang disusun oleh mereka yang memenangkan arena. Saya ingin meletakkan tujuan dari

penelitian ini adalah untuk memahami kaum yang dianggap 'menang' bagaimana mereka mempersepsikan diri dan kekuasaan yang ada di tangannya, memproduksi identitas simbolik yang pada akhirnya suka tidak suka seringkali direproduksi ulang dalam pemahaman awam, sebagaimana yang disinyalir sebagai kekerasan simbolik yaitu sebuah dominasi simbolik oleh mereka yang memegang otoritas menentukan mana yang pantas dan tidak secara estetik. Bahkan saya ingin melihat bagaimana mereka yang dianggap menang ini berusaha bertahan dalam arena di mana mereka berada.

Kerangka Konseptual

Kajian dalam tesis ini menyangkut suatu komunitas politik, yaitu anggota DPR. Agar tidak menemui kesalahpahaman saya mesti menegaskan bahwa saya tidak membicarakan mengenai politik sebagai sebuah term pertarungan kepentingan ideologi, melainkan membicarakan mengenai sebuah komunitas politik di gedung DPR RI atau lebih populer dikenal orang dengan gedung Senayan. Jadi hal-hal yang dipelajari dalam bahasan tesis ini adalah mengenai perilaku tindakan anggota DPR, simbol-simbol yang mereka ciptakan melalui gerak tubuh, tuturan bahasa, bahkan kostum dan atribut kepemilikan benda-benda mereka.

Penting menekankan kajian mengenai isu kekuasaan di dalam tesis ini, bukan hanya karena tesis ini membahas suatu komunitas politik melainkan karena konsep kekuasaan dalam kajian antropologi telah mengalami pergeseran yang sangat kuat sehingga memberikan implikasi secara paradigmatik maupun implikasi metodologis di dalam kajian etnografi.

Isu Kekuasaan

Sederhananya saya ingin meletakkan pembahasan mengenai simbol dari suatu cara lain dalam memandang simbol, yaitu meletakkan pembahasan simbol dengan pendekatan isu kekuasaan. Melalui pendekatan kekuasaan, sistem simbol tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi, melainkan

lebih jauh dari itu simbol juga berperan sangat penting sebagai instrumen dominasi guna menyatakan suatu kekuasaan.

Kekuasaan yang kita bicarakan ini berbeda jauh dari konsep kekuasaan pada paradigma etnografi konvensional yang menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang *embedded*, terikat di dalam status dan kedudukan sosok otoritatif atau terlebih lagi institusi. Pengaruh pemikiran Bourdieu dan Foucault menempatkan kekuasaan dalam posisi yang sentral di dalam kajian antropologi, ia menjadi ruh dalam cara pandang antropologi. Kekuasaan tidak *embedded* di dalam status dan kedudukan orang atau institusi melainkan tersebar dalam semua individu.

Foucault (1980) secara khusus menempatkan kekuasaan sebagai bagian tak terpisahkan dengan pengetahuan (*knowledge*), baginya kekuasaan selalu punya implikasi terhadap pengetahuan maupun sebaliknya. Pengetahuan menyembunyikan dominasi kekuasaan, sementara kekuasaan memproduksi pengetahuan. Keduanya bertimbal-balik. Foucault seterusnya berusaha mengkaji kekuasaan dalam praktek-praktek keseharian, ia menemukan bahwa kekuasaan tidak selalu hanya dimiliki oleh kelas tertentu, melainkan dapat dimiliki oleh semua individu. Menurut Foucault (1980) setiap individu secara simultan sekaligus menjadi *vehicle of power*. Kekuasaan itu menjadi sesuatu yang dinamik, melekat pada perilaku subjek. Ia memiliki energi dinamika, gerak, dan dialektika. Karena itu pembicaraan mengenai status dan otoritas tidak relevan disini, melainkan lebih tepat dikatakan sebagai posisi strategis yang setiap kali dapat berubah-ubah, longgar, dan sangat dinamis.

Tindakan subjek tidak lagi dibimbing oleh suatu roh nilai-nilai, melainkan setiap individu bertindak dalam gerak dinamikanya sendiri, berperilaku, memproduksi simbol-simbol, bahkan juga membangun nilainya sendiri. Nilai menjadi sesuatu yang terikat pada tindakan, perilaku, *behavior* ketimbang suatu nilai panduan yang abstrak mengenai bagaimana seharusnya manusia bertindak. Sementara simbol di dalam term kekuasaan yang baru ini menjadi sebuah bentuk kebudayaan yang penting, namun sifatnya tak lagi statik, melainkan dinamik, dan dapat dimanipulasi. Pemaknaan dari simbol menjadi begitu terikat pada gerak.

Implikasi lebih lanjut, kebudayaan dengan demikian bukanlah sesuatu hal yang statis. Kebudayaan bukan nilai-nilai yang menuntun tindakan individu-individu, melainkan hasil implikatif dari tindakan individu-individu. Di sini kebudayaan menjadi implikatif dan atributif. Sementara nilai-nilai justru digunakan sebagai instrumen untuk memantapkan dominasi kelas, dengan demikian kebudayaan menjadi sesuatu yang lebih operasional.

Dalam bukunya, "*Distinction*" Bourdieu (1984) menjelaskan bahwa kebudayaan ada di dalam simbol, makna, produk budaya. Ia mencontohkan hal-hal keseharian seperti musik, makanan misalnya, dimuati sebagai bentuk kebudayaan yang diabsahkan melalui kelas sosial. Kebudayaan digunakan dalam mereproduksi dominasi kelas sejauh kelas yang mendominasi dapat memantapkan nilai-nilai budaya, standar-standar dan selera mereka dalam masyarakat secara keseluruhan. Di sinilah kebudayaan mendapatkan tempat yang penting di dalam pembicaraan mengenai dominasi, sebab bentuk-bentuknya digunakan sebagai perangkat dominasi.

Baik Bourdieu maupun Foucault membuat deskripsi dan analisa mengenai kompleks strategi dalam suatu masyarakat. Institusi dan struktur adalah implikasi sekunder yang bersifat sementara saja. Posisi-posisi struktural adalah produk sosial sementara yang dapat berubah-ubah sesuai dengan definisi situasi.

Tindakan praktisnya Bourdieu, menekankan hubungan timbal-balik antara si pelaku (subjek) dengan struktur objektif atau kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk simbolik. Implikasi utama konsep ini dalam kebudayaan adalah bahwa simbol-simbol yang terkandung di dalam suatu kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis dan sementara karena keberadaannya tergantung pada praktis para pelakunya yang berada dalam konteks sosial tertentu, yang mempunyai kepentingan tertentu.

Relasi Subjek dan Struktur

Bourdieu mencoba menjelaskan dengan cara lain menjelaskan hubungan subjek dan struktur dengan menyodorkan cara pikir relasional. Menurutnya struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara

dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal-balik (dualitas), keduanya bahkan tidak saling mempertentangkan satu dengan yang lain melainkan saling bertautan dalam sebuah praktik sosial. (Swartz, David, 1997: 62). Subjek dan struktur berdiri dalam dialektika relasional. (Bourdieu, 1990: 124-126). Subjek tidak didikte oleh struktur, namun juga tidak berdiri liar menampik keberadaan struktur. Keduanya berhubungan secara timbal-balik.

Ide Bourdieu menunjuk pada dua hal yang mendasar, pertama adalah praktik sosial, dan yang kedua adalah praktek sosial selalu berada dalam ruang dan waktu. (Fashri, 2007: 63), Bourdieu memperlakukan kehidupan sosial sebagai sebuah interaksi struktur, kecenderungan (disposisi) dan tindakan yang saling mempengaruhi. Artinya praktik sosial tidak didikte secara langsung oleh struktur dan orientasi budaya tetapi lebih merupakan hasil dari proses improvisasi yang kemudian distrukturkan oleh orientasi budaya, sejarah perorangan dan kemampuan untuk berperan di dalam interaksi sosial. Struktur sosial dan pengetahuan tentang struktur itu menghasilkan orientasi *ajeg* bagi tindakan yang kemudian ikut memberi bentuk bagi struktur sosial. Ringkasnya, praktik sosial merupakan hasil interaksi dialektis antara struktur dan pelaku, antara struktur objektif dan representasi subjektif (*habitus*). Bourdieu memilih tidak memisahkan secara diametrical antara keduanya, melainkan lebih memusatkan pada *locus* praktik sosial yang terjalin secara dinamis. Praktik sosial dihasilkan oleh relasi antara *habitus* sebagai produk sejarah dan ranah yang juga merupakan produk sejarah. Pada saat yang bersamaan *habitus* dan ranah merupakan produk dari medan daya-daya yang ada dalam masyarakat. (Takwim, 2007: xx).

Bourdieu tampaknya ingin keluar dari suasana dominasi hubungan struktur dan individu. Ia tidak melihat bahwa subjek sepenuhnya ada di dalam pengaruh dikte struktur. Gugatan Bourdieu mengenai hubungan struktur dan subjek dijelaskan sembari menggugat konsepsi dasar Marxisme mengenai infrastruktur dan suprastruktur dengan mengatakan bahwa hal itu adalah reduksi atas ruang sosial, sebaliknya ia menawarkan apa yang disebutnya *field* atau ranah. Fashri (2007: 78). Gugatan terhadap Marx ia lanjutkan dengan menggugat determinisme ekonomi Marxisme yang mengatakan bahwa bidang kehidupan itu hanya

cerminan dari *mode of economic production*, lalu ia menawarkan adanya kepentingan simbolik. Ia juga menggugat pandangan strukturalisnya kaum Marxian yang meminggirkan subjek (*de-centring subject*), dan sebaliknya ia menawarkan konsepnya mengenai habitus.

Sementara itu, sebaliknya subjek juga tidak sepenuhnya mengekspresikan kehendak diri yang liar yang mampu sepenuh-penuhnya melepaskan diri dari lingkungannya atau struktur. Bourdieu kemudian menawarkan bentuk penjelasan mengenai kehendak subjek itu ke dalam istilah baru yang disebutnya sebagai *habitus*. *Habitus* menurut Bourdieu (1990: 130-131) adalah "*the mental structures through which they apparend the sosial world, are essentially the product of an internalization of the structures of the sosial world*", secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *habitus* adalah hasil internalisasi struktur social. Sejarah memegang peranan besar dalam internalisasi struktur social itu. Melalui habitus itu pulalah, dihasilkan klasifikasi dari perbedaan cita rasa (*taste*).

Takwin (2007: xvii) mengambil dari Bourdieu (1984) *habitus* diartikan sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Ditambahkan bahwa habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. *Habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. *Habitus* dianggap ketaksadaran-kultural, pengaruh sejarah yang secara tak sadar dianggap alamiah, ia bukan bawaan, melainkan produk sejarah.

Habitus ini mendasari adanya ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Ranah itu semacam hubungan terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Baik habitus maupun ranah adalah produk dari medan daya-daya yang ada dalam masyarakat. Dalam ranah itulah berlangsung pertarungan antara kekuatan, baik bagi yang memiliki banyak modal maupun yang memiliki sedikit saja modal. (Takwim, Bagus, 2007: xix). Dengan demikian dapat pula dikatakan

bahwa ranah (*field*) adalah *locus* (tempat) berlangsungnya *habitus-habitus*, di mana di sana pula berlangsung pertarungan untuk memperebutkan sumber daya dan akses tertentu terhadap hirarki kekuasaan. Ranah adalah medan daya-daya yang saling bertarung. *Field* atau ranah adalah locus terjadinya pertarungan daya-daya untuk memperebutkan posisi, “ *field is a field of force, but also a field of struggles tending to transform or converse this field of forces.*” (Bourdieu, 1993: 30). Tampaknya Bourdieu menyisakan pengaruh Marxian yang kuat dengan kecenderungan *conflicting* dalam menjelaskan pertarungan daya-daya dalam ranah (*field*).

Walau pun kesan pengaruh Marx tampak dalam kecenderungan pemikiran Bourdieu yang selalu *conflicting*, namun ia sesungguhnya telah keluar dari determinasi ekonomisme Marx. Ia keluar dari perjuangan kelas dalam hubungan produksi dan menawarkan suatu perjuangan simbolik di dalam ranah. (Bourdieu, 1991: 229).

Karena kita sudah sampai pada penjelasan mengenai ranah sebagai locus dari berlangsungnya pertarungan daya-daya, maka menjadi penting bagi kita untuk membicarakan mengenai modal. Karena pertarungan yang sesungguhnya terjadi antar subjek dalam memperebutkan posisi ditentukan oleh kepenguasaan subjek atas modal. Dalam pembicaraan mengenai modal, Bourdieu lagi-lagi keluar dari definisi Marx mengenai modal yang cenderung ekonomistik. Bourdieu memperluas definisi modal sebagai “...*capital is a social relation, i.e. an energy which only exists and only produces its effects in the field in which it is produced and reproduced, each of the properties attached to class is given its value and efficacy by the specific laws of each field.*” (Bourdieu, 1984: 113). Dalam kaitan dengan itu maka ia memperluas pula jenis-jenis modal sebagai modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal ekonomi dapat mencakup alat produksi, uang, materi, modal budaya mencakup kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun pewarisan keluarga, modal sosial dapat mencakup jaringan sosial yang memiliki kedekatan dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan, serta modal simbolik mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi. (Fashri, 2007:

99). Bourdieu (1984: 112) menempatkan posisi subjek dalam konfigurasi berdasarkan kemampuannya menguasai faktor-faktor yang beroperasi dalam area tersebut yaitu tergantung/ditentukan oleh besaran volume dan struktur modal yang dimilikinya.

Simbol dalam Isu kekuasaan

Penting juga bagi kita untuk melihat elaborasi Bourdieu terhadap pandangan Weber dalam gagasannya mengenai karisma dan legitimasi, ia kemudian mengembangkan teorinya mengenai kekuasaan simbolik (*symbolic power*). Kekuasaan simbolik adalah suatu kekuasaan yang bekerja dengan sangat halus dalam mendapatkan pengakuan. Sangat halus bekerja sehingga seringkali dianggap absah dan karenanya memperoleh legitimasi. Kekuasaan simbolik ini bekerja melalui suatu bentuk dominasi simbolik yang nyaris tak kasat mata. (Bourdieu, 2001); Bourdieu (1990). Melalui *Distinction* (1984) ia juga menggambarkan bahwa kekuasaan itu mampu membangun dominasi, yang kelangsungan dominasinya tergantung dari kemampuan kelas yang mendominasi memantapkan struktur dan selera kelasnya. Salah satu operasi dari kekuasaan itu adalah dengan menggunakan kekerasan simbolik sebuah bentuk dominasi yang bersifat halus sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Legitimasi mengambil peranan yang penting dalam hubungan kekuasaan ini, pihak yang disubordinasi menerima dominasi sebagai suatu kebenaran yang absah.

"symbolic violence, according to Bourdieu, is imposition of system of symbolism and meaning (ie. Culture) upon groups or classes in such a way that they are experienced as legitimate. This legitimacy obscures the power relations which permit that imposition to be successful. In so far as it accepted as legitimate, culture adds its own force to those power relations, contributing to their systematic reproduction. This is achieved through a process of misrecognition: the process whereby power relations are perceived not for what objectively are but in a form which renders legitimate in the eyes of the beholder." (Jenkins, Richard, 1992: 104).

Kekuasaan simbolik menggunakan simbol termasuk di antaranya adalah bahasa sebagai instrumen kekuasaannya. Bahasa juga menjadi instrumen efektif di dalam bekerjanya suatu dominasi terhadap kelompok yang ter subordinasi. Bahasa dari pemegang status yang terlegitimasi menjadi sarana bekerjanya suatu kekerasan simbolik yang sangat halus, nyaris tak kasat mata, menjadi alat pemaksa kebenaran dari kelas dominan. Di sini Bourdieu mula-mula mengambil banyak dasar-dasar Saussurean, namun kemudian mengembangkan penjelasannya mengenai bahasa sebagai bagian dari kekuasaan simbolik. Dalam *Language and Symbolic Power* (1990). Bourdieu membawa keluar bahasa dari lingkungan internal dalam bahasa itu sendiri, dengan kata lain membawa bahasa dari situasi objektif dan kesunyian netralitas bahasa dalam dirinya sendiri. Bourdieu membawa bahasa ke dalam pergaulan dengan lingkungan eksternal dari bahasa. Seketika ia juga memasukkan peran kekuasaan di dalam bahasa, di sinilah bahasa memerankan diri sebagai perantara relasi kekuasaan antar subjek.

Gagasan-gagasan di atas, memperlihatkan bahwa subyek politik memiliki mekanisme tersendiri dalam memahami, bertindak, dan mengartikulasikan ide. Tataran subyek politik berkaitan erat dengan *habitus* sebagai skema interpretatif yang longgar, tidak kaku, dan menjadi pedoman bagi tindakan dalam berkreasi. *Habitus* sebagai pedoman umum yang fleksibel memberikan strategi bagi aktor politik untuk menyesuaikan dan mengatasi berbagai situasi politik yang berubah-ubah dan tidak diduga. *Habitus*, di satu sisi, mempengaruhi secara longgar cara berpikir dan tindakan para aktor politik, di sisi lain, *habitus* memberikan keleluasaan bagi subyek politik untuk berimprovisasi.

Panggung politik dengan segala praktik diskursif yang berlangsung, mensyaratkan adanya analisa yang memandang politik dalam sebuah ranah atau arena. Berbeda halnya dengan *habitus* para aktor politik, ranah politik berada terpisah dari kesadaran individu yang secara obyektif berperan menata hubungan aktor-aktor politik. Ranah politik merupakan arena kekuatan yang di dalamnya hadir upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dengan hierarki kekuasaan. Ranah politik

sebagai sebuah arena pertarungan menggerakkan aktor-aktor politik untuk mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada.

Pentas politik dipahami sebagai ranah pertarungan. Pertarungan itu sendiri mengandaikan berbagai macam potensi yang dimiliki para politisi, kelompok, maupun partai dalam posisinya masing-masing. Ranah politik merupakan *domain* pertarungan demi memperebutkan posisi-posisi di dalamnya. Sejauh mana posisi aktor politik ditentukan oleh alokasi modal atas para pelaku yang berada dalam suatu ranah politik. Dengan begitu, posisi dan jenjang yang diraih para aktor politik bergantung pada seberapa besar modal yang mereka miliki. Modal mesti ada dalam ranah politik agar ranah politik memiliki daya-daya yang memberikan arti.

Hubungan *habitus*, modal dan ranah bertaut secara langsung dan bertujuan menerangkan aktivitas politik sebagai praktik sosial (*sosial practice*). Karakteristik modal dihubungkan dengan skema *habitus* sebagai pedoman tindakan dan klasifikasi serta ranah selaku tempat beroperasinya modal-modal. Sedangkan ranah politik senantiasa dikitari oleh relasi kekuasaan obyektif berdasarkan pada jenis-jenis modal yang digabungkan dengan *habitus*.

Secara implisit, sungguh pun Bourdieu memberikan kritik yang tajam atas determinasi ekonomisme Marx, disadari atau tidak Bourdieu sendiri terpengaruh dengan pemikiran khas kalangan Marxian, yaitu selalu bernuansa conflicting dan kontestatif. Hanya saja konflik di dalam pemikiran Bourdieu menyiratkan konflik yang berada dalam suasana lebih kultural.

Sebagai arena permainan kontestatif, panggung politik seperti halnya parlemen, mengandung kompetisi antar pelaku politik, adanya manuver-manuver guna meraih tujuan dan mengandung konsekuensi menang-kalah. Menjadi terang, di tengah harapan rakyat kepada anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi mereka, selalu dihiasi oleh ajang pertarungan antar politisi, kelompok, maupun partai lewat penggunaan berbagai strategi. Jika aktor politik atau partai berada dalam posisi dominan maka strateginya diarahkan kepada upaya melestarikan dan mempertahankan *status quo*, sementara mereka yang tidak dominan berjuang

mengubah konstelasi distribusi modal, aturan main dan posisi-posisinya sehingga tercapai kenaikan jenjang sosial.

Berdasarkan uraian di atas, parlemen sebagai arena pertarungan dan perjuangan yang begitu dinamis menampilkan para pemain, kekuatan-kekuatan, dan hubungan kekuasaan yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi di dalam posisi-posisi tertentu. Posisi-posisi tersebut tidak datang begitu saja, namun hasil dari pengumpulan atau penukaran berbagai jenis modal, di mana modal ini bisa menjadi sarana sekaligus tujuan itu sendiri. Banyak dari para politisi yang memperebutkan ketua fraksi hanya untuk melipatgandakan pengakuan, otoritas, dan penampilan. Begitu pun kita dapat melihat mandat politik yang mereka terima, serta merta ditukarkan dengan modal ekonomi guna memperoleh proyek, sebagaimana seringkali kita baca dalam berita-berita media massa. Melalui manipulasi simbolik yang dimiliki, mereka mencitrakan dirinya sebagai sosok pembela rakyat, padahal belum tentu demikian dalam kenyataannya. Bahkan, dalam keseharian yang lebih sederhana, kita menemukan gambaran di mana mereka yang sebelum menjadi anggota dewan hidup dengan kesederhanaan ketika masuk ke parlemen harus meniru kebiasaan elite politik yang tampil dengan memobilisasi pernak-pernik atribut simbolik sebagai tanda pengakuan dalam lingkungan sosialnya, sekaligus menciptakan pembeda dengan lingkungan sosial sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Foucault (1980) memberikan pembedaan antara *central regulated* dan format legitimasi kekuasaan, baginya individu selalu dalam posisi simultan dengan kekuasaan. Setiap orang adalah juga elemen dari artikulasi kekuasaan, mereka juga dapat menjadi *vehicle of power*.

Pandangan ini memberi inspirasi bahwa setiap individu dapat saja memiliki kekuasaan. Sebab kekuasaan tidak berada melekat pada status/otoritas, melainkan berada tersebar. Bukan status yang penting melainkan posisi aktor dan relasi-relasi yang dibangunnya. Hal ini sejalan dengan pandangan

konstruktivisme, di mana subjek menjadi sangat penting. Implikasinya secara metodologis bahwa peneliti bukan satu-satunya pemegang otoritas, melainkan subjek yang diteliti pun dapat membangun definisinya sendiri. Di sini aspek emik menjadi kuat.

Implikasi berikutnya adalah bahwa peneliti mesti menyadari sejak awal bahwa segala bentuk nilai itu melekat pada tindakan perilaku, karena perilaku (*behavior*) menjadi penting untuk diamati. Status menjadi tidak penting, yang penting diamati adalah posisi para actor dan relasi-relasi yang dibangunnya. Di sini berarti kekuasaan menjadi implikatif sifatnya. Kekuasaan ditempatkan di akhir, sebagai hasil dari *theoretical construct* dari peneliti di akhir penelitiannya.

Dengan jalan ini pula antropologi kekuasaan menjadi tawaran jalan keluar dalam menghadapi stagnasi antropologi praktis, sebab, kini perubahan menjadi sesuatu yang penting, ia menjadi sangat dinamik. Dinamika yang berpusat pada perubahan ini tidak hanya ada dalam realitas, namun juga mempengaruhi metodologi dan paradigma yang ada. Dalam antropologi praktis, jarak antara teori dan realitas empirik menjadi lebih dekat. Di sanalah letak antropologi kekuasaan ini.

Isu kekuasaan membawa perubahan sebagai isu sentral pula. Kekuasaan dipandang sebagai suatu proses. Ia bukanlah sistem yang terstruktur, sistemik dan bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Jika pun ada hierarki, maka hierarki itu adalah susunan sementara yang senantiasa bergerak dan berubah terus-terus dalam konfigurasinya. Perubahan berada di sentral, lalu ia menjadi entri point untuk membangun penjelasan melalui proses yang reflektif.

Kekuasaan menjadi *sites of representation*, sebagai konsekwensi berpikir proses. Generalisasi dibangun dalam kerangka lokal, regional, dan global tidak secara linier atau pun vertical melainkan dijelaskan secara melingkar, prosessual (menekankan proses), validasinya juga dibangun seiring dengan proses, teori, empirik/data, teori- data, dst, bolak-balik berproses. Penjelasannya holistik, namun berkait dengan gerak. Kita kemudian menemukan generalisasi dengan kosakata baru yaitu refleksi. Refleksifitas metodologis dalam membangun teori. Di sinilah kekuasaan bukan hanya menjadi isu teori melainkan juga metodologi.

DPR RI, dipandang sebagai sebuah situs yang dipenuhi oleh bertaburannya bentuk-bentuk simbolik yang dinyatakan para anggota DPR, dalam tindakan perilaku, gerak tubuh, bahasa, bahkan pula kostum. Pembicaraan mengenai simbol merupakan hal yang serius dan peka. Menangkap simbol-simbol dalam perilaku anggota DPR bukan soal mudah bagi saya, sebab simbol dalam penelitian ini adalah simbol yang melekat pada gerak perilaku subjek-subjek. Begitu dinamis, begitu kreatif subjek-subjek menciptakan simbol-simbol, karenanya kepekaan dan sensitivitas sangat diperlukan disini, sebab bila tidak kita tidak akan mampu menangkap gerak itu.

Sementara itu ketidaksabaran yang sesekali hinggap pasti akan menjebak kita dalam kedangkalan makna-makna. Jangan-jangan yang bisa ditangkap hanyalah wajah di permukaan saja dan bahkan dapat saja terjebak pada pengamatan mengenai mekanisme prosedural DPR saja. Ketekunan adalah juga soal penting disini, sebab bila tidak maka kita akan mengeluhkan pengamatan terhadap rutinitas di DPR seperti persidangan misalnya, yang akan terasa sangat membosankan. Hanya ketekunan yang akan membantu peneliti untuk melihat pola dari suatu pengamatan yang berulang-ulang.

Saya menganggap bahwa anggota DPR adalah individu yang memiliki kemampuan kreatif di dalam menciptakan simbol-simbol bagi diri maupun kelompoknya. Kalau boleh dikatakan mereka adalah subjek yang aktif. Mereka mampu memainkan simbol dan memberikan interpretasi kepada simbol tersebut, bahkan mewacanakan simbol tersebut kepada publik.

Menyadari hal tersebut maka saya menganggap isu emik menjadi sangat signifikan di dalam penelitian ini. Dalam antropologi isu etik dan emik merupakan persoalan penting. Melalui Pelto and Pelto (1970: 62) kita akan melihat pembagian kategori etic dan emic. Secara sederhana emik mengacu pada pandangan masyarakat yang kita kaji (*native point of view*) (Fetterman, 1989: 30), sementara etik mengacu pada pandangan si peneliti (*scientist point of view*) (Fetterman, 1989: 32). Menurut Fetterman (1989: 30) emik adalah perspektif dari *native* tentang realitas. Untuk memahami *meaning* adalah melalui *meaning* dari *native* itu sendiri, sebab masyarakatlah yang membentuk makna (*meaning*),

mendefinisikan makna dan juga sistem nilai mereka. Sebagaimana disampaikan Saifuddin (2005: 89) bahwa konstruksi emik adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan dianalisis. Walau pun demikian peneliti dituntut kemampuannya membangun pengetahuan etiknya sebagai konseptualisasi atau eksplanasi bangunan klaim teoritik. Konstruksi etik adalah kejadian atau situasi yang deskripsi dan analisisnya dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah. Dengan demikian, di dalam etik, juga ada langkah validasi, bahwa deskripsi dan analisisnya harus dapat diterima oleh komunitas ilmiah. Menurut Saifuddin (2005: 94), tanpa pembedaan emik dan etik secara tegas tidak mungkin kita menunjukkan apakah eksplanasi yang diberikan oleh ilmuwan sosial berbeda dari yang diberikan pihak lain. Sebagai antropolog, klaim kita untuk mementingkan eksplanasi yang sah dan dapat dipercaya terletak pada upaya kita membangun pengetahuan etik. Disanalah menurut saya letak kemampuan kritis peneliti, sekaligus tantangan atas kemampuannya mengatasi arus isu emik dan etik.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang meletakkan data dari informan sebagai data primer, sementara data lain sifatnya sekunder. Penelitian ini mula-mula dilakukan dengan terus-menerus mengamati perilaku subjek di persidangan suatu komisi tertentu, lalu mengikuti keterlibatan subjek-subjek tertentu dalam persidangan lain, atau kehidupan sehari-hari mereka. Pengamatan dilakukan hingga peneliti menemukan *pattern*, suatu pola tertentu dari perilaku mereka.

Pola itu kemudian diwakili atau direpresentasikan oleh subjek-subjek tertentu yang dipilih peneliti karena dianggap secara cukup dapat mewakili gambaran suatu kecenderungan pola yang ada. Tentu saja akan ditemukan pola-pola umum, namun tidak dihindari adanya variasi internal di dalam pola tersebut. Peneliti mengharapkan para pembaca dapat menemukan pola umum yang

dimaksudkan peneliti dan variasi internalnya di dalam penulisan lebih lanjut nantinya.

Selanjutnya perlu disampaikan mengenai beberapa hal teknis penelitian menyangkut situs penelitian, waktu, subjek, serta teknik pengumpulan data sebagaimana disampaikan di bawah ini.

Situs

Penelitian ini dilakukan di kompleks gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengambilan data dilakukan tak terbatas pada seputar kompleks Senayan saja. Peneliti memulainya dari pengamatan terhadap sidang-sidang dalam komisi tertentu, lalu mengikuti subjek terus-menerus termasuk ke rumah para subjek atau tempat-tempat lainnya.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2007 hingga Juni 2008, namun demikian tidak menutupi kemungkinan bahwa pengalaman peneliti yang telah lebih dari 3 tahun di berada di DPR turut pula mewarnai tesis ini.

Subjek Penelitian

Subjek pokok penelitian ini adalah anggota DPR periode 2004-2009. Periode ini dianggap mewakili periode pasca otoritarian orde baru. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa informan penelitian ini tak hanya anggota DPR melainkan juga para sopir, asisten pribadi, staf ahli, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai seorang peneliti etnografi, saya sangat diuntungkan oleh situasi, pertama karena saya selama 3 tahun lebih ini bekerja di DPR, dengan demikian saya memiliki akses masuk di gedung DPR serta memiliki banyak kenalan anggota DPR, serta pekerja lain di sana. Kedua, saya meneliti dalam situasi momentum yang tepat yaitu mendekati pergantian periode pemilu 2009. Situasinya 'panas', ditandai dengan pembahasan paket RUU politik dan gejolak

perebutan kepastian tiket menuju Senayan 2009 mendatang atau dengan kata lain kepastian kesempatan para anggota DPR untuk mempertahankan posisinya sebagai anggota DPR periode mendatang.

Kenyataan bahwa saya telah cukup lama bekerja di DPR, benar-benar situasi yang menguntungkan dalam penelitian ini. Mengingat pada Lynne (2004), dalam pengantar buku *Anthropology In The Field*, menekankan pentingnya peneliti "being there." Setidaknya untuk memenuhi syarat untuk *being there*, saya telah mengenali medan lapangan dengan baik. Saya mengenal hampir setiap sudut kompleks, saya juga mengenali orang-orang yang ada di sana dari para petugas pengamanan, *cleaning service*, sopir, pemilik warung, jenis-jenis tamu yang keluar masuk gedung DPR, para asisten pribadi anggota DPR serta tentu saja para anggota DPR sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa saya memulai penelitian ini dari suatu keseharian yang saya kenali dengan baik. Hanya saja tentu penelitian ini lebih mensistematisir pengenalan saya dengan petunjuk-petunjuk teoritis yang memandu saya.

Hubungan baik yang selama ini telah terbina membantu saya dalam mengumpulkan data dari para informan. Begitulah, mula-mula penelitian ini dimulai dari hubungan baik yang telah ada di antara saya dan para anggota DPR. Begitu baiknya sehingga saya bahkan tidak membutuhkan prosedur resmi untuk wawancara seperti surat-menyurat untuk meminta waktu wawancara. Wawancara mendalam (*depth interview*) terjadi dalam perjalanan bersama anggota DPR, makan bersama, bincang-bincang ringan di rumah mereka, dan beragam aktivitas harian lainnya.

Berikutnya adalah mengamati persidangan anggota DPR itu. Mencatat pembicaraan persidangan, atribut kelengkapan mereka, gerak-gerik mereka dalam sidang, termasuk cara interaksi mereka dengan wartawan, kamera, kolega sesama DPR, serta masyarakat yang mereka temui. Mulanya saya mengamati satu persidangan komisi terus-menerus, lalu mulai mengamati berbagai persidangan lain yang diikuti anggota DPR tertentu, termasuk pansus dan paripurna.

Namun demikian bukan berarti saya tidak memiliki keterbatasan dalam penelitian ini. Persidangan di DPR RI tidak semuanya terbuka, saya hanya dapat

mengikuti rapat di tingkat paripurna DPR, komisi atau pansus yang bersifat terbuka untuk umum terutama Rapat Dengar Pendapat dan rapat kerja. Rapat Panja bersifat tertutup, saya hanya dapat mengikuti beberapa rapat panja yang bersifat tertutup melalui hubungan baik dengan staf komisi atau pansus yang terkait serta anggota DPR yang dapat saya dekati dan karenanya memberikan akses masuk pada saya. Namun selebihnya dari itu seperti rapat tim perumus, tim sinkronisasi, rapat intern komisi atau pansus, saya tidak dapat mengikutinya. Saya juga tidak dapat mengikuti lobby antar fraksi, namun hanya dapat menyaksikan forum lobby pansus di balik kaca tebal tanpa mendengar sepatah kata pun.

Berikutnya saya melengkapi pengamatan dengan mengambil foto-foto yang saya anggap penting dalam memperkuat data pengamatan. Walaupun saya termasuk orang 'dalam' atau pekerja di gedung DPR, bukan berarti saya mendapatkan akses yang mudah untuk mengambil foto, saya benar-benar menghindari rasa curiga dan tak nyaman dari informan atau petugas keamanan yang di banyak tempat ada. Tetapi saya tak kehilangan akal, kamera handphone sangat membantu merekam gambar, bahkan kadang-kadang saya mengambil foto pamdal dan dengan senangnya dia berpose untuk saya.

Bagi saya konfirmasi data adalah soal penting. Saya beruntung karena memiliki banyak kawan dan mengenal banyak informan lain yang membantu saya mengkonfrontir data atau memperkuat data dalam pengamatan saya. Mereka boleh jadi adalah para sopir yang sangat 'tahu,' para asisten anggota DPR, staff ahli dan sumber-sumber lainnya. Dengan demikian saya tidak hanya memperoleh data dari pengamatan terhadap anggota DPR, wawancara dengan anggota DPR, namun juga dengan para informan pendukung lainnya.

Sementara itu wawancara, dialog, bahkan diskusi dengan anggota DPR boleh jadi terjadi setiap saat, dalam sela-sela sidang, di rumah, bahkan juga di mobil bersama. Semua pertanyaan yang muncul merupakan "*open ended question*," (Fetterman, 1989: 54-56), suatu wawancara yang memungkinkan penelitian menyusun pertanyaan yang senantiasa terbuka sesuatu situasi. Interview atau wawancara juga merupakan teknik mengumpulkan data yang sangat penting dalam etnografi. Interview adalah interaksi verbal antara subjek dengan informan.

Suatu wawancara mestilah berjalan lebih *friendly*, cara terbaik untuk melakukan interview adalah membuatnya *se-natural* mungkin.

Referensi juga sangat membantu saya memperdalam hasil data lapangan saya. Setidaknya saya membaca beberapa tesis yang subjeknya berhubungan adalah anggota DPR RI, juga buku-buku ringan yang disusun oleh anggota DPR sendiri. Semua itu menambah informasi yang penting untuk memperkaya hasil temuan saya.

Anggapan bahwa saya mengerjakan tesis ini secara linier adalah salah. Kadang-kadang saya justru bolak-balik antara temuan lapangan, balik lagi kepada bacaan literatur, kembali lagi ke lapangan. Saya justru memulai tesis ini dari menginventarisir temuan lapangan, lalu membaca literatur, dan menyusun proposal. Setelah itu memulai pengamatan lapangan, wawancara, balik lagi membaca literatur. Mengkoding berulang-ulang, membaca lagi, dan seterusnya. Proses yang bolak-balik, tidak linier, maju ke muka, kembali lagi ke awal, dan seterusnya bolak-balik. Bagi saya, ini konsekwensi menulis etnografi sebagai proses, tidak linier, tetapi bolak-balik melakukan refleksi. Dan kali inilah tesis yang saya ajukan kepada sidang pembaca.

Penulisan

Saya ingin memulai penulisan tesis ini dari sesuatu yang saya kenali dengan baik. Sebagai sebuah situs, DPR RI adalah *setting* yang saya kenali dengan baik. Melalui tulisan ini saya ingin mengajak para pembaca melihat gedung DPR RI beserta para aktor di dalamnya tidak dalam suasana prosedural mekanistik. Saya ingin kita semua melihatnya sebagai suatu situs tempat komunitas sosial yang berinteraksi dengan dinamis.

Tesis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di DPR itu terjadi. Tesis ini juga tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluk-beluk mekanisme persidangan. Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana anggota DPR RI itu membentuk identitas dirinya melalui simbol-simbol.

DPR RI menurut saya adalah sebuah ranah interaktif yang dipenuhi dengan simbol-simbol. Setiap atribut, gerak-gerik, bahasa adalah simbol. Saya ingin memulai tulisan ini dengan mengantarkan pembaca pada bentuk-bentuk simbolik yang mengukuhkan identitas anggota DPR itu sebagai anggota dewan yang terhormat yang segala bentuk simboliknya itu ditujukan untuk membedakannya dari masyarakat kebanyakan.

Dari pembagian lift, penggunaan logo mobil, pin di baju anggota DPR bukan hanya sekedar persoalan konsekuensi akses yang berbeda, melainkan lebih jauh dari itu anggota DPR secara simbolik dipisahkan dari masyarakat kebanyakan. Mereka menggunakan lift yang berbeda dari para tamu, karyawan, cleaning service, dan lain-lain. Mereka menggunakan logo mobil secara khusus yang dengan itu mendapatkan akses jalur masuk yang berbeda dari orang lain, tempat parkir yang berbeda pula, serta layanan ekstra yaitu dibukakan pintu mobil oleh para petugas pengamanan. Demikian pula dengan pin di baju, yang membuat mereka tak perlu mengalami pemeriksaan tas di pintu masuk gedung, mendapatkan akses masuk melalui ruangan khusus lobby yang nyaman dan tak penuh sesak dengan hilir-mudik para tamu, serta layanan ekstra dibukakan pintu masuk setiap lantai oleh petugas pengamanan yang khusus ditempatkan di setiap lantai ruangan perkantoran anggota DPR. Hal-hal tersebut bukanlah sekedar akses melainkan juga pengukuhan pembedaan identitas anggota DPR dengan masyarakat kebanyakan.

Simbol-simbol lain juga diciptakan bukan hanya untuk menyatakan pembedaannya terhadap masyarakat kebanyakan tetapi juga untuk menyatakannya pembedaan terhadap anggota DPR lainnya. Bisa dikatakan bahwa mereka membangun komunikasi simbolik yang prioritasnya tidak ke bawah melainkan ke atas. Misalnya saja kemunculan mereka dalam *cover* majalah. Majalah tersebut beredar di DPR, dan nyaris tak saya temui di tempat penjualan majalah umum. Contoh lain adalah buku, belakangan ini anggota DPR sibuk membuat buku. Bukunya bahkan diberi *cover* foto dirinya dan keluarganya. Buku itu tidak dicetak luas lalu dipublikasikan secara komersial, melainkan terbatas untuk dibagikan tentu saja mula-mula adalah kepada koleganya di DPR, mungkin saja sebagiannya

juga dibagikan kepada konstituennya di daerah. Sekolah, bersekolah juga bukan sekedar seorang anggota DPR ingin menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah di program pasca sarjana misalnya adalah soal tambahan titel di belakang namanya, yang menjadikan seorang anggota DPR tampak sebagai seorang yang berpendidikan dan lebih bagus lagi berpendidikan lebih tinggi dari koleganya kebanyakan.

Simbol juga muncul melalui mobil mewah, handphone merk terbaru, dan juga laptop mahal, perhiasan, baju mahal, pilihan tempat makan, hilir mudik di hotel mewah, pesta sunatan anak di hotel, undangan kawinan yang lux. Berbagai konsumsi ini bukanlah ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan fungsional saja, melainkan merupakan bentuk konsumsi simbolik. Tulisan Bourdieu dalam *Distinction*, di mana ia mencontohkan kecenderungan perbedaan konsumsi musik pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dan seterusnya pernyataan teoritiknya mengenai *taste* konsumsi, membuat saya tertarik untuk membandingkan temuan saya dengan tulisan Bourdieu tersebut. Tampaknya saya harus jujur untuk membenarkan teori Bourdieu mengenai *taste* tersebut, bukan sebagai suatu *taklik* melainkan komparasi situasi. Lebih lanjut, konsumsi ini bagi saya adalah juga bentuk simbolik yang lagi-lagi tidak disampaikan ke bawah melainkan disampaikan ke atas. Suatu komunikasi simbolik vertikal yang ditujukan untuk mengukuhkan keberadaannya di dalam komunitas politik mereka atau meminjam sedikit istilah Bourdieu, mengukuhkan posisi keberadaannya di dalam ranah tempat mereka berada.

Dari sini, tampak bukan bagaimana DPR menjadi sebuah situs yang sangat menarik untuk diamati, sebab setiap tampilannya dipenuhi dengan simbol-simbol yang interpretatif?

Pada bagian berikutnya saya ingin membawa pembaca pada fungsi simbol-simbol di dalam ranah DPR. Simbol-simbol tersebut mencerminkan suatu bentuk penguasaan atas modal-modal, sebab simbol-simbol tersebut bukanlah berfungsi sekedar menjembatani gagasan dan realitas yang dihadapi subjek melainkan lebih jauh dari itu simbol dimuati bandulan suatu daya tawar, yang digunakan subjek di dalam konfigurasi posisi dalam ranah. Maka simbol-simbol dimunculkan kini

untuk mewakili penguasaan jenis modal-modal. Apa saja modal yang ada di sini? Dalam penelitian ini setidaknya saya mendapatkan jejak-jejak temuan modal-modal yang saya kelompokkan dalam empat jenis modal. Pada dasarnya semua anggota DPR telah memiliki modal simbolik melekat dalam status jabatannya sebagai anggota DPR atau wakil rakyat. Mereka dapat memperbesarnya dengan kedudukan prestisius sebagai pimpinan fraksi, komisi, serta badan-badan kelengkapan DPR lainnya. Berikutnya adalah modal yang berupa materi, misalnya saja yang ditunjukkan melalui kepemilikan/konsumsi materi baik mobil, modal, uang, dan lain-lain.

Berikutnya adalah modal yang berupa jaringan sosial. Jaringan sosial ini dapat berupa hubungan kekerabatan dengan lingkaran penguasa partai, *labelling de corps*, keterlibatan dalam jaringan kelompok faksi di dalam partai, dapat pula berupa jaringan terhadap massa, hubungan dengan aktor-aktor penting negara, dan lain-lain. Jaringan sosial ini ditampakkan melalui simbol-simbol yang dengan kreatif diciptakan anggota DPR, tak jarang melalui manipulasi bentuk identitas simbolik. Di dalam situasi politik yang makin panas menjelang pemilu 2009, modal sosial yang satu ini semakin menguat.

Berikutnya adalah modal budaya yang berupa kapasitas individual subjek, misalnya ditunjukkan melalui sekolah, buku, dan usaha meraih popularitas. Popularitas adalah soal penting di sini. Selain bahwa dalam membangun popularitas itu berhubungan dengan media massa memegang peranan penting, namun bentuk teatrikal berhadapan dengan media juga hal yang tak kalah penting. Anggota DPR juga mesti pandai berinteraksi terutama dengan media televisi. Di bawah sorotan kamera itulah segala gerak-gerik menjadi diatur sedemikian rupa, termasuk tutur kata dalam pernyataan di media. Kapasitas individual lainnya adalah kemampuan berbicara, menggiring opini persidangan, negosiasi, pengalaman berpolitik, lobby, dan juga kepemimpinan dalam sidang. Keikutsertaan dalam badan-badan atau alat-alat kelengkapan dewan yang strategis setidaknya menjadi ukuran secara sederhana kapasitas individual anggota DPR. Ini juga kadangkala menjadi gengsi tersendiri buat mereka yang terlibat di dalamnya.

Selanjutnya menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya fungsi kategorisasi modal-modal tersebut di dalam interaksi di DPR. Maka pada bagian ini, saya ingin membawa kategori modal-modal tersebut di atas ke dalam ranah yang bersifat kontestatif. Subjek-subjek pemilik modal itu melakukan pembesaran bahkan konversi modal satu kepada modal lainnya. Mereka juga melakukan akumulasi modal-modal, tentu saja tak jarang akumulasi modal secara keseluruhan.

Perlu dipahami sejak mula, bahwa DPR adalah suatu situs yang sangat politis. Situasi politis itu dapat dijelaskan dengan kata lain bahwa DPR adalah suatu ranah yang sangat kompetitif, penuh dengan situasi kontestasi kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan yang dinamis, sebab ia berada dalam situasi atau setting yang dapat berubah-ubah, sangat longgar, sehingga bukan sebuah situasi yang tetap. Posisi setiap subjek di dalam ranah itu sangat dinamis. Posisi setiap subjek di dalam ranah tadi ditentukan oleh kemampuannya untuk memperbesar porsi modal, melakukan konversi modal dan mengakumulasi modal-modal yang ada. Tidak ada satu pun subjek yang memiliki akumulasi modal yang sama persis, sebab jika pun bentuk-bentuk modalnya sama, porsi dari masing-masing modal tersebut berbeda.

Seorang subjek, ia bisa suatu kali berada dalam posisi perifer, lalu tiba-tiba terdorong dalam posisi ke tengah. Saya menggambarkannya seperti spiral yang semakin lama berputar semakin mengerucut. Suatu kali seorang subjek bisa berada di pinggir, lalu makin ke tengah ke atas, atau tiba-tiba tergeser kembali ke pinggir. Setiap subjek di dalamnya, selalu berjuang untuk mempertahankan posisinya, memperoleh posisi baru yang lebih kuat, dengan menggunakan segala modal-modal yang dimilikinya atau bahkan memperbesar modal tersebut. Situasi yang sungguh sangat dinamis, setiap kali terus berubah-ubah. Pada bagian terakhir akan ditutup dengan refleksi pendek yang berusaha membuat suatu rangkaian penjelasan yang komprehensif pada semua bagian dari penulisan ini.